POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA ORBA

Delfa Anggriana[1] , Saskia Putri Andini[2], Mila Puspita Sari[3], Fadly Fakhri Rasyid[4], Etmi Hardi[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : anggrianadelfa@gmail.com[1], saskiaputriandini10@gmail.com[2], milapuspitas123@gmail.com[3], fadlinfakhrirasyid@gmail.com[4], etmihardi@fis.unp.ac.id[5]

ABSTRACT

Indonesia's foreign policy during the New Order era experienced a shift in orientation that focused more on national stability and economic development. Under President Soeharto's leadership, Indonesia continued to implement the principle of a free and active foreign policy, although its implementation became more pragmatic in order to support national interests. Indonesia actively participated in various regional and international organizations and cooperation such as ASEAN, the Non-Aligned Movement (NAM), G77, OIC, AFTA, and OPEC. In addition, Indonesia also played a role in maintaining regional security through ZOPFAN, SEANWFZ, and efforts to resolve the Cambodian conflict. Towards the end of the New Order era, Indonesia normalized diplomatic relations with the People's Republic of China (PRC), which had a positive impact on the economic and political relations between the two countries. This study uses a literature review method by utilizing various scientific journals and relevant academic sources.

Keywords : *Foreign Policy, New Order, ASEAN, Regional Cooperation.*

ABSTRAK

Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru mengalami perubahan arah yang lebih berfokus pada stabilitas nasional serta pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia tetap menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, tetapi pelaksanaannya cenderung lebih pragmatis demi mendukung kepentingan nasional. Indonesia turut aktif dalam berbagai organisasi dan kerja sama internasional maupun regional seperti ASEAN, Gerakan Non-Blok (GNB), G77, OKI, AFTA, dan OPEC. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam menjaga keamanan kawasan melalui ZOPFAN, SEANWFZ, serta upaya penyelesaian konflik Kamboja. Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC) yang berdampak positif terhadap hubungan ekonomi dan politik kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan memanfaatkan berbagai jurnal ilmiah dan sumber akademik yang relevan.

Kata Kunci : *Politik Luar Negeri, Orde Baru, ASEAN, Kerja Sama Regional.*

PENDAHULUAN

Politik luar negeri merupakan salah satu sarana utama yang digunakan oleh suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain guna mewujudkan kepentingan nasionalnya. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menetapkan prinsip bebas aktif sebagai landasan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Prinsip ini berarti Indonesia tidak berpihak pada kekuatan atau blok tertentu, tetapi tetap berperan secara aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia serta membangun kerja sama internasional yang saling menguntungkan. (Haryanto, 2014).

Seiring berjalannya waktu, penerapan politik luar negeri Indonesia mengalami penyesuaian yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi politik dalam negeri maupun dinamika internasional. Pada masa Orde Baru, prinsip bebas aktif tetap dijadikan dasar, namun lebih diarahkan untuk mendukung stabilitas nasional dan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara pada dasarnya berkaitan erat dengan kondisi internal serta prioritas pembangunan yang sedang dijalankan pada periode tertentu.

Dalam implementasinya, politik luar negeri Indonesia diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi regional dan internasional seperti ASEAN, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), G77, serta OPEC. Keterlibatan tersebut mencerminkan upaya pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperluas kerja sama internasional guna mendukung kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam berbagai inisiatif kerja sama keamanan regional seperti ZOPFAN dan SEANWFZ, serta turut berperan dalam upaya penyelesaian konflik Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berfokus pada hubungan bilateral, tetapi juga aktif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui forum multilateral. (Refansa & Azhar, 2025).

Selain keterlibatan dalam organisasi regional, Indonesia juga memainkan peran penting dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui partisipasinya dalam misi penjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik dunia. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam upaya menciptakan stabilitas dan perdamaian global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini digunakan karena penelitian dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pembahasan mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru.Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, seperti jurnal akademik, buku, serta artikel ilmiah yang membahas politik luar negeri Indonesia, prinsip bebas aktif, dan keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Selain itu, digunakan juga sumber-sumber ilmiah lain yang membahas kebijakan luar negeri Indonesia serta kontribusinya terhadap perdamaian dunia.Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan kajian terhadap dokumen serta literatur ilmiah, termasuk jurnal seperti Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (Haryanto, 2014) dan Jurnal Pendidikan Tambusai (Refansa & Azhar, 2025). Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama penelitian, yaitu prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif, implementasinya pada masa Orde Baru, serta peran Indonesia dalam organisasi regional dan internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada Era Orde Baru

Landasan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru berpegang pada prinsip dasar negara yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan ikut menciptakan perdamaian dunia. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menerapkan prinsip bebas dan aktif, yaitu tidak berpihak pada blok kekuatan dunia mana pun tetapi tetap berperan aktif dalam menjaga stabilitas internasional. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam mengubah arah politik luar negeri dari masa konfrontatif Orde Lama menuju pendekatan yang lebih stabil dan kerja sama internasional, seperti normalisasi hubungan dengan negara tetangga serta keterlibatan kembali dalam organisasi internasional.(Arifin, Jumadi, & Najamuddin, 2018).

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan politik luar negeri diarahkan untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional dan stabilitas dalam negeri. Pemerintah Soeharto menjalankan kebijakan yang lebih pragmatis dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara Barat guna memperoleh bantuan ekonomi dan investasi asing. Selain itu, Indonesia kembali aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan membentuk kerja sama regional melalui ASEAN untuk memperkuat posisi di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini juga disertai dengan penyesuaian terhadap dinamika Perang Dingin, termasuk pembekuan hubungan dengan Tiongkok yang dianggap berkaitan dengan ancaman ideologi komunis. (Arifin, Jumadi, & Najamuddin, 2018; Fhadilla & Lestari, 2026).

Indonesia dan Kerjasama regional

A. ASEAN

ASEAN (Association of South East Asian Nations) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kerja sama antarnegara di wilayah Asia Tenggara. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan pendirinya yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Semasa periode Orde Baru, Indonesia menjadi salah satu anggota aktif dalam ASEAN yang merupakan bagian dari strategi diplomasi luar negeri Indonesia. Lewat keikutsertaan dalam ASEAN, Indonesia berjuang untuk mempererat hubungan bilateral antar negara-negara di Asia Tenggara, menjaga keamanan dan kestabilan kawasan, serta mengoptimalkan kerja sama internasional.

Tujuan utama ASEAN meliputi:

1. Memacu pertumbuhan ekonomi, kemajuan di bidang sosial, dan pengembangan budaya di kawasan Asia Tenggara.
2. Mewujudkan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan aturan hukum.
3. Menguatkan kerja sama di sektor ekonomi, sosial, budaya, teknologi, iptek, dan administrasi publik.
4. Memberikan bantuan timbal balik dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian.
5. Memperluas kerja sama di bidang pertanian, industri, perdagangan, jasa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6. Menjalin kerja sama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional.

ASEAN kini memiliki 10 negara anggota. Selain lima negara pendiri, anggota lainnya adalah Brunei Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), Myanmar

(23 Juli 1997), dan Kamboja (16 Desember 1998). Hingga sekarang, ASEAN memiliki peran penting bagi negara anggotanya, termasuk Indonesia. (Setyowati dkk, 2018).

B. Gerakan Non-Blok (GNB)

Gerakan Non-Blok (GNB) adalah organisasi negara-negara berkembang yang didirikan untuk menghindari sikap memihak kepada Blok Barat maupun Blok Timur sewaktu Perang Dingin berlangsung. Indonesia merupakan salah satu pihak yang memprakarsai pendirian GNB, hal ini tidak terlepas dari politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan prinsip bebas aktif. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa Indonesia memiliki kebebasan dalam mengambil kebijakan tanpa bergantung pada kekuatan besar dunia dan berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia.Pada masa pemerintahan Orde Baru, keterlibatan Indonesia dalam GNB tetap menjadi prioritas sebagai implementasi politik luar negeri yang bebas aktif. Bukti nyata peran Indonesia tampak ketika menjadi anfitri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta tahun 1992.

Dalam pertemuan tersebut Indonesia mendorong kerja sama antarnegara berkembang, memperkuat perdamaian dunia, serta meningkatkan hubungan ekonomi internasional. Indonesia juga mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih dijajah dan menolak segala bentuk kolonialisme serta imperialisme.Melalui keikutsertaan dalam GNB, Indonesia berhasil memperkuat hubungan diplomatik dengan banyak negara berkembang dan menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas dunia internasional. Keaktifan Indonesia di GNB membuktikan bahwa pada masa Orde Baru Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif melalui kerja sama internasional.(Sadewad kk, 2023).

C. G77

Pada masa Orde Baru, Indonesia menempatkan diri sebagai bagian dari kelompok negara berkembang yang tergabung dalam Group of 77. Dalam kerangka World Systems Theory, posisi Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara semi-periferi yang berupaya meningkatkan posisi tawar di tengah dominasi negara inti. Indonesia menggunakan forum G77 sebagai ruang diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam sistem ekonomi global yang tidak seimbang.

Keterlibatan Indonesia dalam G77 menunjukkan strategi solidaritas Selatan-Selatan yang bersifat pragmatis. Indonesia tidak mengambil posisi konfrontatif terhadap negara maju, tetapi lebih memilih pendekatan negosiasi dalam isu ekonomi internasional. Sikap ini mencerminkan kebutuhan Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan negara core demi mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai jembatan antara kepentingan negara berkembang dan sistem global yang didominasi negara maju.

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam kerja sama Non-Aligned Movement yang memperkuat posisi negara-negara Selatan dalam tatanan dunia. Melalui forum ini, Indonesia mendorong prinsip keadilan ekonomi internasional dan kerja sama pembangunan. Namun, efektivitas solidaritas ini sering dibatasi oleh perbedaan kepentingan antarnegara anggota G77, terutama antara negara semi-periferi dan periferi.Secara keseluruhan, politik luar negeri Indonesia pada era Orde Baru dalam konteks G77 menunjukkan strategi adaptif dalam sistem dunia. Indonesia berusaha memaksimalkan posisi dalam struktur global yang hierarkis tanpa melakukan konfrontasi langsung terhadap negara inti. Hal ini memperlihatkan bahwa solidaritas Selatan-Selatan lebih bersifat strategis daripada ideologis.

D. OKI

Dalam konteks politik luar negeri Indonesia semasa Orde Baru, Indonesia juga berkontribusi dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). OKI adalah organisasi internasional-Nonmiliter yang terbentuk di Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1969. Organisasi ini muncul menyusul insiden pembakaran Masjid Al Aqsha yang mendorong negara-negara Islam untuk bergabung dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Keanggotaan OKI mencakup negara-negara yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam. Partisipasi Indonesia dalam OKI dijalankan sebagai implementasi politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru. Melalui keikutsertaan dalam OKI, Indonesia berusaha mempererat solidaritas di antara negara-negara Islam dan mengembangkan kerja sama di sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, serta.iptek. OKI juga bertujuan menyatukan kekuatan dunia Islam, menjaga perdamaian dan keamanan, serta mempererat hubungan antar negara anggota.

Selain itu, nilai-nilai OKI juga selaras dengan arah politik luar negeri Indonesia, seperti kesetaraan antar negara, pengakuan terhadap kedaulatan dan kemerdekan negara lain, tidak mencampuri urusan domestik negara lain, serta penyelesaian perselisihan secara damai melalui perundingan, mediasi, dan arbitrase. Dengan menjadi bagian dari OKI, Indonesia menunjukkan kontribusinya dalam memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara Islam pada era Orde Baru.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) masih menghadapi berbagai obstacle dalam upaya menjadi entitas kosmopolitan demokratik. Dalam aspek kesetaraanantar negara, terjadi dominasi oleh negara-negara besar seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki yang membawa kepentingan politik dan ideologi masing-masing. Situasi tersebut memicu kompetisi pengaruh dan membatasi partisipasi yang setara di dalam organisasi. Dalam aspek hibriditas budaya, OKI telah menempuh beberapa inisiatif keterbukaan melalui dialog antarbudaya, perhatian terhadap masalah perempuan, Islamophobia, dan perlindungan komunitas Muslim minoritas. Namun, konflik sektarian dan perbedaan budaya antar anggota masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan integrasi budaya yang inklusif

Sementara itu, dalam pelaksanaan HAM individu, OKI memperlihatkan komitmen terhadap isu sosial tertentu seperti perlindungan minoritas Muslim dan pemberdayaan perempuan. Akan tetapi, hak politik, kebebasan berpendapat, dan partisipasi individu di banyak negara anggota masih terbatas akibat budaya politik yang cenderung otoriter..

E. AFTA

AFTA (ASEAN Free Trade Area) merupakan bentuk kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN yang dibentuk pada KTT ASEAN IV di Singapura tahun 1992. Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas, menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, serta menciptakan pasar regional.Dalam pelaksanaannya, negara-negara ASEAN menerapkan skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT), yaitu program penurunan tarif dan penghapusan hambatan perdagangan antarnegara anggota.

Bagi Indonesia, penerapan AFTA membawa peluang sekaligus tantangan. Indonesia memperoleh peluang memperluas perdagangan dan meningkatkan kerja sama ekonomi regional. Namun Indonesia juga menghadapi kendala berupa lemahnya daya saing industri, tingginya biaya produksi, hambatan birokrasi, serta keterbatasan kemampuan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menghadapi persaingan pasar bebas.Pada era Orde Baru, keterlibatan Indonesia dalam AFTA menunjukkan upaya pemerintah memperkuat kerja sama ekonomi regional sebagai bagian

dari politik luar negeri Indonesia yang berorientasi pada pembangunan ekonomi, stabilitas kawasan, dan integrasi ASEAN.(Inayati,2010).

F. NAFTA

North American Free Trade Agreement (NAFTA) merupakan kerja sama perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika Utara. NAFTA mulai berlaku pada tahun 1994 dengan tujuan mengurangi hambatan perdagangan antarnegara anggota (Ramadhan & Adelins, 2021).

Bagi Indonesia, keberadaan NAFTA memberikan pengaruh terhadap perdagangan internasional karena persaingan pasar global menjadi semakin ketat. Indonesia perlu meningkatkan kualitas produk ekspor agar mampu bersaing dengan negara-negara anggota NAFTA. Selain itu, Indonesia juga memperkuat kerja sama ekonomi regional seperti ASEAN dan AFTA untuk menghadapi perkembangan perdagangan bebas dunia.

Pada masa Orde Baru, Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan memperluas hubungan ekonomi internasional. Walaupun tidak tergabung dalam NAFTA, Indonesia tetap menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara anggota NAFTA, terutama Amerika Serikat, dalam bidang ekspor dan investasi. (Ramadhan, 2021)

G. OPEC

Pada masa Orde Baru, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang menekankan stabilitas ekonomi nasional dan penguatan kerja sama internasional di sektor strategis. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut terlihat melalui keterlibatan Indonesia dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries. Indonesia mulai aktif dalam organisasi ini sejak awal 1960-an dan tetap mempertahankan keanggotaannya pada masa Orde Baru. OPEC menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam perdagangan minyak dunia dan menjaga stabilitas pendapatan negara dari sektor energi. Pada periode ini, minyak menjadi komoditas utama yang menopang pembangunan ekonomi nasional.Dalam kerangka politik luar negeri Orde Baru yang berorientasi pada kepentingan nasional, keterlibatan Indonesia di OPEC berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi. Indonesia tidak hanya berperan sebagai anggota, tetapi juga aktif dalam forum internasional yang membahas produksi dan harga minyak dunia. Partisipasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi global terkait energi.

Selain itu, OPEC juga memberikan ruang bagi Indonesia untuk membangun hubungan dengan negara produsen minyak lain seperti Arab Saudi, Iran, dan negara anggota lainnya. Kerja sama ini membantu Indonesia menjaga stabilitas pasokan energi dan memperluas jaringan ekonomi internasional. Namun, posisi Indonesia dalam OPEC pada masa Orde Baru juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi domestik. Ketika kebutuhan energi dalam negeri meningkat dan produksi minyak mengalami tekanan, Indonesia mulai menghadapi tantangan dalam mempertahankan status sebagai negara pengekspor minyak bersih. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika antara kepentingan nasional dan kebijakan organisasi internasional. Secara keseluruhan, keterlibatan Indonesia dalam OPEC pada masa Orde Baru mencerminkan strategi politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, khususnya dalam sektor energi dan pembangunan.

Indonesia dan Kerja Sama Keamanan Regional (ZOPFAN, SEANWFZ, dan Masalah Kamboja)

Kerja sama keamanan regional ASEAN dibangun berdasarkan beberapa kesepakatan penting seperti Deklarasi Bangkok (1967), ASEAN Concord I (1976), serta konsep ZOPFAN

(Zone of Peace, Freedom and Neutrality). ZOPFAN menegaskan bahwa Asia Tenggara harus menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral dari intervensi kekuatan besar luar kawasan. Prinsip ini kemudian diperkuat melalui pembentukan SEANWFZ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone) yang bertujuan menjaga kawasan dari ancaman senjata nuklir dan memperkuat stabilitas keamanan regional.Dalam praktiknya, ASEAN menerapkan pendekatan yang dikenal sebagai ASEAN Way, yaitu penyelesaian konflik melalui musyawarah, konsensus, dan diplomasi damai tanpa intervensi langsung terhadap kedaulatan negara anggota. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN lebih menekankan stabilitas kawasan melalui kerja sama dan dialog dibandingkan pendekatan militer (Indrawan & Pratomo, 2024).

Salah satu tantangan terbesar bagi stabilitas kawasan adalah konflik Kamboja–Vietnam pada akhir 1970-an. Konflik ini dipicu oleh invasi Vietnam ke Kamboja pada tahun 1978 yang menggulingkan rezim Khmer Merah dan kemudian membentuk pemerintahan baru di bawah pengaruh Vietnam. Situasi ini menimbulkan ketegangan regional karena dianggap sebagai bentuk intervensi yang mengancam prinsip kedaulatan negara.

ASEAN merespons konflik tersebut dengan pendekatan diplomatik dan kolektif. Indonesia memainkan peran penting sebagai mediator dengan mendorong dialog antara pihak-pihak yang bertikai serta memperkuat posisi ASEAN sebagai fasilitator perdamaian. Upaya ini dilakukan melalui berbagai forum seperti Jakarta Informal Meeting (JIM) yang menjadi bagian dari proses panjang penyelesaian konflik hingga tercapainya perdamaian di awal 1990-an (Nurdin Syah, 2018).Keberhasilan penyelesaian konflik Kamboja menunjukkan bahwa prinsip ZOPFAN dan pendekatan ASEAN Way memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Meskipun ASEAN tidak memiliki kekuatan militer untuk intervensi, pendekatan diplomasi dan konsensus terbukti efektif dalam meredakan konflik melalui kerja sama regional dan peran aktif negara seperti Indonesia.

Normalisasi Hubungan RI dengan RRC

Normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan pertimbangan keamanan nasional. Setelah terputusnya hubungan pasca Gerakan 30 September 1965, wacana normalisasi mulai muncul pada tahun 1970-an melalui interaksi informal dalam forum internasional. Proses ini memperlihatkan adanya dua kelompok utama dalam pengambilan kebijakan, yaitu kelompok pro dan kontra normalisasi. Kelompok pendukung, seperti Departemen Luar Negeri dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), menilai bahwa normalisasi dapat menghilangkan hambatan diplomatik, membuka peluang perdagangan, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Sementara itu, kelompok penolak seperti ABRI dan sebagian politisi partai Islam menilai bahwa normalisasi berisiko terhadap stabilitas keamanan karena masih adanya kekhawatiran terhadap komunisme dan isu etnis Tionghoa di Indonesia.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada masa ini tidak hanya ditentukan oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan ideologis dan keamanan. Kelompok kontra menekankan bahwa RRC masih dianggap berpotensi mendukung gerakan komunisme di Asia Tenggara, sehingga normalisasi dinilai belum layak dilakukan. Di sisi lain, pada periode 1980-an, dukungan terhadap normalisasi semakin menguat, terutama dari Kadin dan Departemen Luar Negeri, seiring dengan orientasi pembangunan ekonomi Indonesia yang berfokus pada ekspor dan peningkatan citra internasional. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas kebijakan luar negeri dari pendekatan keamanan menuju pendekatan ekonomi.

Proses pengambilan keputusan normalisasi hubungan RI–RRC juga mencerminkan model politik luar negeri yang melibatkan dua level utama, yaitu birokrasi organisasi dan tingkat pengambilan keputusan puncak. Pada level birokrasi, berbagai institusi seperti Departemen Luar Negeri, DPR, militer, dan kelompok kepentingan memberikan masukan yang saling bertentangan. Namun, keputusan akhir tetap berada pada Presiden sebagai aktor utama dalam kebijakan luar negeri. Hal ini terlihat dari keluarnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1985 yang membuka hubungan dagang sebagai langkah awal tanpa normalisasi diplomatik penuh. Pada akhirnya, normalisasi resmi baru terjadi pada tahun 1990 setelah adanya kesepakatan antara kedua negara, yang menandakan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Indonesia sangat ditentukan oleh kepemimpinan eksekutif dan perkembangan kondisi geopolitik regional

KESIMPULAN

Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip bebas aktif sebagai pedoman utama. Prinsip tersebut menekankan sikap tidak memihak pada blok kekuatan dunia mana pun, namun tetap berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian internasional serta meningkatkan kerja sama antarbangsa. Secara praktis, kebijakan luar negeri Orde Baru menunjukkan kecenderungan yang berorientasi pada Stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi.

Pemerintah menempuh pendekatan pragmatis dengan memperluas jaringan hubungan bilateral dengan berbagai negara serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan Organisasi internasional. Transformasi ini tercermin dari semakin meningkatnya partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional, seperti PBB, ASEAN, GNB, OKI, G77, serta kerja sama ekonomi termasuk AFTA dan OPEC. Dalam lingkup regional, Indonesia memainkan peran strategis dalam memperkuat solidaritas kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN. Indonesia juga aktif dalam memelihara kestabilan kawasan dengan memanfaatkan mekanisme ZOPFAN dan SEANWFZ, serta berpartisipasi dalam penyelesaian konflik Kamboja melalui jalur diplomasi. Peran ini menegaskan kedudukan Indonesia sebagai aktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam diplomasi kawasan. Dalam lingkup global, Indonesia memperkuat posisi negara berkembang melalui G77 dan Gerakan Non-Blok.

Selain itu, Indonesia juga memelihara hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara besar, mencakupnormalisasi hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok serta kerja sama perdagangan dengan negara-negara anggota NAFTA. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara aspek ideologis dan kebutuhan ekonomi. Secara komprehensif, politik luar negeri Orde Baru menunjukkan karakter yang adaptif dan pragmatis. Indonesia tetap menjaga prinsip bebas aktif, akan tetapi implementasinya disesuaikan dengan dinamika pembangunan nasional, konteks Perang Dingin, serta perubahan dalam sistem ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Muhammad. 2017. Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Keluar dari Keanggotaan OPEC pada Tahun 2016. JOM FISIP Universitas Riau, Vol. 4 No. 2.

Inayati, R. S. (2010). Implementasi AFTA: Tantangan dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, 7(2), 59–76.

Indrawan, J., & Pratomo, R. R. (2024). Mekanisme resolusi konflik di ASEAN: ASEAN sebagai fasilitator konflik. Indonesian Journal of International Relations, 9(2), 349–368.

Ningsih, Sabda. 2025. "Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai Entitas Kosmopolitan Demokratis: Analisis Dinamika Internal dan Tantangan Struktural." Indonesian Journal of International Relations, Vol. 9, No. 2.

Nurdin Syah, W. N. (2018). Peran Indonesia menjaga keamanan regional ASEAN dalam konflik Kamboja–Vietnam tahun 1978–1991. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ramadhan, I., & Adelins, T. (2021). Governmental Sources dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terkait Renegosiasi Kesepakatan North America Free Trade Area (NAFTA). Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 6(1), 19–33.

Refansa, D. A., & Azhar, I. Y. (2025). Peran Indonesia dalam Struktur Pemerintahan Internasional untuk Mewujudkan Perdamaian Global pada Abad 21. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 1357–1364.

Sadewa, Dzikiara Pesona & Falhan Hakiki. 2023. "Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia melalui Gerakan Non-Blok (GNB)." Jurnal Lemhannas RI, Vol. 11 No. 1.

Setyowati, R. N., Kartikasari, M. M., & Habibah, S. M. (2018). Hubungan internasional dan politik global. Surabaya: Unesa University Press.

Setyowati, Rr. Nanik, Maya Mustika Kartikasari, dan Siti Maizul Habibah. 2018. Hubungan Internasional dan Politik Global. Surabaya: Unesa University Press.

Zahra, Ray Nanda. 2025. "Solidaritas Selatan-Selatan dalam Forum G77: Strategi Kolektif Melawan Dominasi Utara (Analisis menggunakan World Systems Theory - Immanuel Wallerstein)." Indonesian Journal of International Relations, Vol. 9, No. 2.